

HARIAN  
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK  
01 MARET 2011

PENDIRI:  
Ardi, S.Si, Apt

BUTON, BUTENG, BUSEL, BUTUR, WAKATOBI, MUNA, MUBAR, KOLAKA  
BOMBANA, KENDARI, BAUBAU

# Baubau Post

Baubaupost.com

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

SABTU  
16 November 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

## KY Awasi Sidang Lanjutan Guru Supriyani di PN Andoolo, Berbuntut Pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito



KY mengawasi sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan anak yang menjerat guru Supriyani di PN Andoolo, Konawe Selatan.

Laporan: Mashuri, Baubau Post, Durasi Times

KENDARI, BP-Komisi Yudisial (KY) mengawasi sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan anak yang menjerat guru honorer SD Negeri 4 Baito, Supriyani, di Pengadilan Negeri (PN) Andoolo, Konawe Selatan. Agenda sidang pada hari ini yaitu pembacaan pleidoi atau nota pembelaan Supriyani.

## Pemkot Baubau Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Perdana di TK Negeri PO5 di Palagimata



Laporan: Hengky TA  
BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mulai melaku-

kan uji coba program makan bergizi gratis Kamis (14/11/2024) di Taman Kanak-Kanak

Negeri PO5 Palagimata. Menurut Pj Wali Kota Baubau Dr H Muh Ras-

Lanjutan ke Hal: 7

“Konsistensi KY untuk memantau dan mengawasi sidang lanjutan perkara dengan terdakwa, Ibu Supriyani,” kata Koordinator KY Perwakilan Sulawesi Tenggara, Hariman, di PN Andoolo, Rabu (13/11).

Hariman menyatakan KY ingin memastikan

Lanjutan ke Hal: 7

## Pemkot Baubau Siapkan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027



Pewarta: Lisna

BAUBAU, BP-menyiasati ketidakstabilan ekonomi akibat perger-

Laporan: Kasrun

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah desain surat suara calon tunggal

dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan memuat dua kolom ko-

Lanjutan ke Hal: 7

## Sehari Setelah di Lantik, Pj Busel Ridwan Badalla Langsung ‘Tancap Gas’ Laksanakan Tugas



Laporan: Ardi

BUSEL, BP-Sehari pasca pelantikan sebagai Pj. Bupati Buton Selatan,

Selasa (12/11/2024), DR. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM langsung

Lanjutan ke Hal: 7

## MK Ubah Desain Surat Suara Calon Tunggal Pilkada, Berlaku di 2029



Ilustrasi

Laporan: Kasrun

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah desain surat suara calon tunggal

dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan memuat dua kolom ko-

Lanjutan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM  
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA  
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



## KY Awasi Sidang Lanjutan Guru Supriyani di PN Andoolo, Berbuntut Pencopotan Kapolsek dan Kanit Reskrim Baito

bahwa sidang berlangsung tanpa intervensi dari pihak manapun. Sidang juga berjalan adil dan transparan.

“Kita mau memastikan tidak ada seorang pun yang ingin menjatuhkan kehormatan hakim dalam persidangan,” tuturnya.

Supriyani didakwa melakukan kekerasan terhadap siswa berinisial CD (8). Siswa itu merupakan anak dari Apida Hasyim Wibowo, Kepala Unit Intelijen Polsek Baito.

Menurut jaksa penuntut umum (JPU), Supriyani melakukan kekerasan dengan cara memukul CD dengan gagang sapu ijuk. Akibat kekerasan itu, korban disebut mengalami luka lecet dan memar.

Supriyani sejak awal membantah tuduhan itu. Sejumlah keterangan saksi juga tak bisa membuktikan kekerasan itu terjadi. Namun, kasus hukum terus bergulir hingga

ke meja persidangan.

Saat kasus berjalan, ada dugaan permintaan ‘uang damai’ Rp50 juta oleh polisi kepada Supriyani. Selain itu, juga ada seseorang yang mengaku dari pihak Perlindungan Perempuan Anak menginformasikan bahwa Kejari Konawe Selatan meminta duit Rp15 juta supaya Supriyani tak ditahan.

Kini, JPU menuntut bebas Supriyani dari seluruh dakwaan. Jaksa mengatakan tindakan Supriyani memukul korban bukan suatu tindak pidana dan tidak bersifat jahat.

Sementara itu, tuntutan dari kasus ini, Kapolsek Baito Ipda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin dicopot dari jabatannya usai diduga meminta uang damai kepada guru SDN 4 Baito Supriyani agar tidak ditahan.

Keduanya dicopot berdasarkan Surat

Telegram yang diterbitkan Polres Konawe pada Senin (11/11) kemarin. Kabar pencopotan itu juga turut dibenarkan oleh Kapolsek Konawe AKBP Febry Syam.

“Iya benar, sudah diganti dan ditarik ke Polres,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Dalam surat pencopotan itu, Muhammad Idris dimutasi dari sebelumnya Kapolsek Baito menjadi anggota SDM Polres Konawe Selatan.

Sementara untuk posisi Kapolsek Baito diisi oleh Plh Ipda Komang Budayana. Kemudian jabatan Kanit Reskrim Polsek Baito yang sebelumnya dijabat oleh Aipda Amiruddin kini dijabat oleh Aiptu Indriyanto.

Febry menjelaskan pencopotan itu dilakukan pihaknya dalam rangka menciptakan situasi kondusif di masyarakat terkait kasus guru Supriyani yang diduga melakukan ke-

kerasan terhadap anak polisi.

Sebelumnya, penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulawesi Tenggara masih terus mendalami terkait penerimaan uang damai Rp2 juta oleh Kapolsek Baito dari terdakwa Supriyani agar tidak ditahan.

Dalam perkara ini, Propam Polda Sultra telah mengambil keterangan enam orang personel baik dari Polres Konawe dan Polsek Baito.

“Enam dari anggota dan juga dari kades, dari keterangan yang sudah diberikan masih perlu didalami lagi penyidik internal,” ungkapnya.

Iis menerangkan bahwa sampai saat ini penyidik masih terus menggali keterangan dari enam anggota polisi dan oknum kades tersebut terkait permintaan uang damai hingga Rp50 juta dalam perkara yang menjerat Supriyani. (\*)

## Pemkot Baubau Siapkan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027

rah Kota Baubau kurun waktu dua tahun lamanya, 2025-2027.

Mendahului penyusunan roadmap ini yang melibatkan OPD teknis, Kabag Ekonomi dan SDA Setda Baubau, Safrin SSTT. Par menyatakan bahwa roadmap ini didahului dengan kegiatan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) bagi penyusun roadmap nantinya.

“Kita buka wawasan dulu sebelum roadmap ini disusun, agar semua OPD teknis beserta fungsional Perencanaannya mengetahui secara spesifik, hal apa yang menjadi tawaran unit kerja dalam dokumen roadmap,” kata Safrin Kamis pagi ini di Palagimata, 14 November 2024.

Pengembangan Kapa-

sitas ini menghadirkan pemateri teknis yakni; Makmur Panjaitan “Ekonom Bank Indonesia Perwakilan Prov. Sultra dan Kepala Bappeda Baubau, Dr. Dahrul Dahlan.

Sementara Pj. Sekretaris Daerah Baubau La Ode Aswad, S.Sos, MSi dalam sambutannya pada acara ini meminta semua OPD yang berkaitan langsung dengan Pengendalian Inflasi Daerah untuk menyiapkan segenap data teknis yang dibutuhkan.

“Sebab tujuan kegiatan ini untuk terkendalinya inflasi daerah, jangan sampai kita gagal menyusun peta jalan (roadmap). Supaya terkendali lakukan berdasarkan keunggulan dan ampuan OPD masing-masing,” imbua La Ode Aswad

Aswad juga menyarankan agar dokumen yang dihasilkan juga melahirkan rekomendasi yang berkaitan peran strategis stakeholder masing-masing, seperti Bulog, Pertamina, dan BUMN/BUMD lainnya

“Intinya peta jalan ini bisa menaksir komoditas, musim dan sebagainya sebagai antisipasi inflasi yang terjadi di Kota Baubau.” tandas Aswad.

Dijelaskan Aswad, pengendalian inflasi di tingkat daerah adalah tindakan pemerintah atau otoritas kebijakan ekonomi di tingkat lokal atau regional untuk mengelola laju inflasi, yang merupakan peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa. (\*\*)

## Sehari Setelah di Lantik, Pj Busel Ridwan Badalla Langsung “Tancap Gas” Laksanakan Tugas

melaksanakan tugasnya di Batauga, Buton Selatan.

Pada hari Rabu (13/11/2024) pagi, Pj. Bupati Buton Selatan bersama keluarga bertolak dari Kendari ke Batauga, Buton Selatan untuk memulai tugas pemerintahannya, kapal yang ditumpanginya tiba pada siang hari, transit di salah satu hotel di Kota Baubau, selanjutnya dijemput menuju Batauga, ibu kota Kabupaten Busel.

Penyambutan orang

nomor satu di Bumi Gajah Mada ini disambut warga yang telah menantinya beberapa jam sebelumnya. Penyambutan di depan Rujab Bupati sedereetan siswa SD, SMP di wilayah Lakambau dan Laompo, para Ka. OPD (ASN), PKK, Dharma Wanita, para Kepala Sekolah, PGRI, IGTK, Kades dan perangkatnya, dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi bersama seluruh kepala OPD dan Kabag Lingkup Setda, sekaligus perke-

nalan dengan Pj. Bupati Buton Selatan.

Sesuai instruksi Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen Pol. (Purn.) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., ia harus memastikan pendistribusian logistik pemilu berjalan dengan lancar dan aman. Selain itu, menyiapkan pelaksanaan program pemerintah pusat terkait makan siang bergizi gratis, serta memodernisasi sistem administrasi pemerintahan. (\*)

## Pemkot Baubau Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis Perdana di TK Negeri PO5 di Palagimata

man Manafi, SP, M.Si program makan bergizi gratis merupakan perintah dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Prabowo dan Gubernur Sultra agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera memprioritaskan dan mempersiapkannya.

“Salah satunya bagaimana persebaran sekolah kita kemudian bagaimana kemampuan komoditas kita dan mudah-mudahan pangan lokal bisa kita gunakan juga, termasuk menu makanannya. Karena setiap daerah itu berbeda kalau misalnya di daerah pegunungan kita gunakan ikan agak susah dia cari tapi kalau disini ikan mungkin mudah,

begitu juga sayur sayuran. Jadi kita uji coba ini untuk tahu kesiapan kita termasuk kita tahu begini pola dan menu yang akan kita persiapkan. Sehingga pada saat ini mulai didorong oleh Pemerintah Pusat, kita sudah bisa komunikasikan, kita sudah coba seperti apa baiknya, jangan kita blank sama sekali,” ujarnya.

Ditambahkan, kebutuhan makan bergizi gratis adalah buat generasi mendatang. Karena itu, pihaknya mengajak untuk bergerak terlebih dahulu dan jangan menunggu anggaran baru bergerak. “Dan saya berharap hari ini kita uji coba di PAUD, besok lusa SD dan SMP

didik. Program ini sampai dengan Desember akan digencarkan terus mulai dari satuan pendidikan selanjutnya adalah Sekolah Dasar, kemudian Sekolah Menengah Pertama sehingga akan membentuk pola dan kebiasaan.

Sedangkan Kadis Kesehatan dr Lukman, SP.PD mengungkapkan, perhitungan kalori akan dilakukan pada uji coba selanjutnya, dalam hitungan berkisar antara 1100 sampai 2000 KKal yang diberikan buat anak-anak. Kemudian, selanjutnya yang menjadi pegangan adalah bagaimana pangan lokal yang bergizi, protein hewani tinggi itu bisa digunakan untuk masyarakat. (\*)

## MK Ubah Desain Surat Suara Calon Tunggal Pilkada, Berlaku di 2029

song di bagian bawah yang berisi pilihan untuk menyatakan ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’ terhadap satu pasangan calon. Ketentuan baru ini mulai berlaku pada Pilkada 2029.

MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Wanda Cahya Irani dan Nicholas Wijaya dalam perkara nomor: 126/PUU-XXII/2024.

“Mengadili: dalam pokok permohonan: men-

gabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (14/11).

MK menyatakan Pasal 54C ayat (2) dan Pasal 54D ayat (3) UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 1/2015 tentang Pemilihan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945.

“Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” ucap Suhartoyo.

Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan ketentuan-ketentuan yang mengatur perihal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menjamin terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang ber-

rada di tangan rakyat.

MK mempertimbangkan model plebisit yang meminta rakyat atau pemilih untuk menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tersebut dan bukan dengan kolom kosong.

Hal itu sebagaimana telah dipertimbangkan MK dalam paragraf 3.15 sampai dengan subparagraf 3.16.2 Putusan MK Nomor 100 Tahun 2015.

Enny mengatakan PKPU 14/2015 telah

mengatur ketentuan desain surat suara yang pada pokoknya mengkomodasi mekanisme plebisit yang dikehendaki MK dengan menggunakan surat suara yang memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon dan dua kolom kosong untuk memberikan pilihan setuju atau tidak setuju (vide Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 14/2015.

“Desain surat suara dalam PKPU 14/2015 dimaksud telah digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015,” ucap Enny.

Dalam perjalanannya, pembentuk UU memodifikasi surat suara yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon.

Dalam hal ini model surat suara tidak lagi memuat foto pasangan calon, nama pasangan calon dan dua kolom un-

tuk menyatakan pilihan setuju atau tidak setuju, melainkan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom: satu kolom berisi foto pasangan calon, dan satu lagi kolom kosong yang tidak bergambar.

Perubahan desain surat suara dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 tidak lagi menggunakan model plebisit sebagaimana dalam Pilkada Serentak Tahun 2015.

Berkenaan dengan hal tersebut, MK dalam putusan nomor 14/2019 tetap berpendirian yang sama dengan putusan 100/2015.

MK kembali menegaskan kolom kosong yang tidak bergambar dalam surat suara pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 bukanlah pasangan calon, melainkan merupakan tempat bagi pemilih untuk menyatakan tidak setuju dengan satu saja pasan-

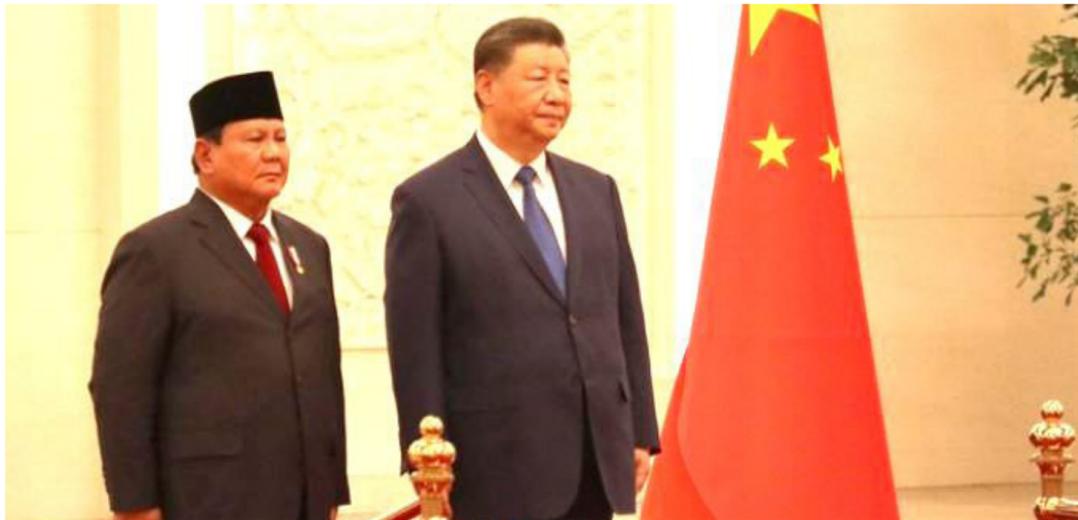
gan calon yang mengikuti kontestasi.

“Pendirian Mahkamah dapat dibaca dalam Pertimbangan Hukum subparagraf 3.11.2 dan subparagraf 3.11.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2019,” tutur Enny.

Dengan demikian, pemilih yang setuju dengan pasangan calon tunggal dimaksud diberi tempat untuk menyatakan persetujuannya dengan mencoblos kolom yang memuat foto pasangan calon.

Sementara pemilih yang tidak setuju dengan pasangan calon tunggal diberi tempat menyatakan ketidaksetujuannya dengan mencoblos kolom kosong yang terdapat dalam surat suara, sehingga pilihan menyatakan tidak setuju pada kolom kosong dalam surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C ayat (2) UU 10/2016 menurut MK dalam putusan a quo juga merupakan suatu model plebisit. (\*)

## Sikap RI soal Laut China Selatan di Era Presiden Prabowo dan Jokowi



Pernyataan bersama yang dibuat Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping menuai kritik. Dinilai ada perubahan sikap RI soal Laut China Selatan

### Laporan: Hadi

JAKARTA- Isu mengenai Laut China Selatan kembali menghangat setelah Presiden Prabowo Subianto lawatan ke Beijing dan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Usai pertemuan, Prabowo dan Xi Jinping membuat pernyataan bersama.

Butir ke-9 pernyataan bersama itu menyebutkan Indonesia dan China mencapai kesepakatan tentang pengembangan bersama di wilayah-wilayah yang saat ini berada dalam situasi tumpang tindih klaim.

Kedua negara sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama yang bertujuan meningkatkan kerja sama dengan prinsip saling menghormati, setara, saling menguntungkan, sesuai dengan peraturan hukum masing-masing.

Poin itu mendapat kritik dari beberapa pakar karena dinilai menunjukkan perubahan sikap pemerintah soal Laut China Selatan.

Salah satu kritik datang dari Guru Besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Ia menduga wilayah yang tumpang tindih itu adalah perairan yang dikenal sebagai Laut Natuna Utara.

Perairan itu bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan sembilan garis putus atau nine dash line China. Seiring berjalannya waktu, jumlah garis berubah-ubah, tapi masyarakat internasi-

onal lebih mengenalnya sebagai nine dash line.

"Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas sepuluh [dulu sembilan] garis putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan," kata Hikmahanto.

Ia berkata hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia tidak mengakui klaim sepihak sembilan garis putus China. Sebab, klaim itu tidak diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) di mana Indonesia dan China termasuk negara peserta.

Permanent Court of Arbitration pada 2016 juga sudah menegaskan klaim sepihak China tersebut memang tidak dikenal dalam UNCLOS.

"Namun, dengan adanya joint statement 9 November lalu, berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas sepuluh garis putus. Perlu dipahami, joint development hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling bertumpang tindih," ucap Hikmahanto.

Seentara itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan kerja sama maritim RI dengan China sebagai upaya untuk memelihara perdamaian dan persahabatan di kawasan. Kerja sama itu tidak dapat dimaknai sebagai pen-

gakuan atas klaim nine dash line China.

"Indonesia menegaskan kembali posisinya selama ini bahwa klaim tersebut tidak memiliki basis hukum internasional dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982," ujar Kemlu.

Menurut Kemlu kerja sama tersebut tak berdampak terhadap kedaulatan, hak berdaulat, maupun yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara.

Di era Jokowi, Isu mengenai Laut China Selatan beberapa kali mengemuka di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Pada November 2015, Jokowi meminta semua negara yang terlibat dalam masalah Laut China Selatan menghormati hukum internasional yang berlaku. Ia saat itu berharap negosiasi code of conduct bisa dipercepat.

Lebih dari enam bulan setelahnya situasi sempat memanas. Pada Juni 2016, Jokowi mengirim sinyal kepada pemerintah China dengan menggelar rapat di atas kapal perang di perairan Natuna.

Rapat digelar pasca insiden TNI AL menembak kapal nelayan China karena mencuri ikan di ZEE Laut Natuna Utara. Saat itu pemerintah China protes kepada pemerintah Indonesia.

Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman mengatakan Indonesia ingin memberi sin-

yal kepada pemerintah China soal kedaulatan negara.

"Kami tidak mau kedaulatan kami diganggu siapapun," kata Luhut.

Indonesia pada 2020 juga sempat melayangkan nota protes kepada China karena kapal penjaga pantai dan kapal penangkap ikan mereka memasuki perairan Natuna. Kemlu memanggil Duta Besar China di Jakarta untuk menyampaikan protes tersebut.

Retno Marsudi yang saat itu menjabat Menteri Luar Negeri mengatakan telah terjadi pelanggaran kapal-kapal China di ZEE Indonesia.

"Saya kira statement yang disampaikan sudah sangat baik bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi saat itu.

Sementara dalam wawancara eksklusif yang dikutip The New Straits Times, Mei 2023 lalu, Jokowi menyatakan seluruh klaim atas Laut China Selatan yang tak memiliki dasar hukum tak boleh dibiarkan terjadi.

Menurut Jokowi, salah satu kunci untuk mengatasi ancaman konflik di Laut China Selatan yakni dengan patuh terhadap UNCLOS 1982.

"Kunci untuk ini adalah kepatuhan terhadap hukum internasional terhadap UNCLOS 1982. Ini adalah kuncinya," ujar dia. (\*)

## Budi Gunawan soal Perjanjian RI-China: Tak Ganggu Kedaulatan di Natuna

### Laporan: Husni

JAKARTA-Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) memastikan pernyataan bersama RI-China soal kerja sama maritim tidak mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Kerja sama Indonesia dan China sebagaimana telah disepakati bersama tidak akan berdampak pada kedaulatan dan yurisdiksi kita terutama di Laut Natuna Utara sebagaimana yang diisukan itu, karena semuanya dilaksanakan dengan sesuai ketentuan UU dan peraturan negara masing-masing," kata BG di Kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11).

Ia mengatakan prinsip yang ditekan dalam kerja sama itu adalah saling menghormati, kesetaraan, saling menguntungkan dan membangun konsensus sesuai dengan peraturan negara masing-masing.

"Artinya Indonesia selama ini kita tetap berpedoman pada UU Nomor 17 tahun 1985 yang merupakan ratifikasi dari UNCLOS 1982, dengan aturan turunannya itu tetap berlaku," ujarnya.

Ia menjelaskan pernyataan bersama RI-China itu merupakan terobosan baru Prabowo dalam rangka menciptakan kestabilan di kawasan

"Sabilitas kerja sama, keamanan dengan membentuk code of conduct baru, yaitu joint operation, jadi tidak saling curiga tetapi kerja sama dalam rangka mengikat semua pihak," katanya.

Sebelumnya Poin ke-9 dalam pernyataan bersama Prabowo-Xi Jin-



Menko Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) memastikan pernyataan bersama RI-China soal kerja sama maritim tidak mengganggu kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.

ping memaparkan Indonesia-China sepakat memperkuat dan memperluas kerja sama maritim.

Pernyataan itu berbunyi: kedua pihak akan bersama-sama menciptakan lebih banyak terobosan dalam kerja sama maritim.

Kedua pihak menekankan kerja sama maritim sebagai komponen penting dalam kerja sama strategis komprehensif antara China dan Indonesia. Mereka akan secara aktif menajaki dan melaksanakan lebih banyak proyek kerja sama maritim, menciptakan lebih banyak terobosan positif, bersama-sama menjaga perdamaian dan ketenangan di laut, memperbaiki sistem tata kelola maritim, menjaga laut tetap bersih dan indah, serta mencapai kesejahteraan maritim.

Kedua pihak juga mencapai kesepakatan penting tentang pengembangan bersama di wilayah yang memiliki klaim tumpang tindih, serta sepakat untuk membentuk Komite Pengarah Bersama Antar-Pemerintah guna menajaki dan memajukan kerja sama terkait berdasarkan prinsip "saling menghormati, kesetaraan, manfaat bersama, fleksibilitas, pragmatisme, dan pem-

bangunan konsensus," sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengkritik poin tersebut yang dinilai sangat terkait dengan sengketa Laut China Selatan.

Perairan itu menjadi titik panas konflik setelah China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan teritorial sejumlah negara terutama negara di ASEAN.

Selama ini, Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa teritorial dengan Beijing di Laut China Selatan. Meski begitu, sikap kapal-kapal Tiongkok yang semakin getol mengganggu dan menerobos perairan RI terutama di Natuna membuat Indonesia mau tak mau menegaskan kedaulatannya di perairan tersebut yang bersinggungan langsung dengan Laut China Selatan.

"Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh [dulu sembilan] Garis Putus telah berubah secara drastis," kata Hikmahanto dalam rilis resmi. (\*)

## MK: Pejabat Daerah-TNI/Polri Bisa Dipidana Jika Tak Netral di Pilkada

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan pejabat daerah dan anggota TNI/Polri bisa dipidana jika melanggar prinsip netralitas pada pemilihan kepada daerah (pilkada).

Hal itu dipastikan setelah mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Syukur Destieli Gulo dengan menambahkan pejabat daerah dan anggota TNI/Polri sebagai subjek hukum baru. Hal tersebut bertujuan demi menjaga netralitas aparaturnegara dalam pemilihan kepala daerah.

Demikian termuat dalam putusan perkara nomor: 136/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada hari ini, Kamis (14/11).

"Mengadili: dalam pokok permohonan: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo.

MK menilai norma Pasal 188 UU 1/2015 telah

melanggar prinsip negara hukum dan jaminan terhadap hak kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon.

Oleh karena itu, MK menyatakan ketentuan norma Pasal 188 UU 1/2015 tentang Penetapan Perppu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparaturnegara sipil negara, Anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp600.000,00 atau paling banyak Rp6 juta".

"Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya," ucap Suhartoyo.

MK memandang penting untuk menambahkan frasa 'pejabat daerah' dan frasa 'anggota TNI-Polri' dalam Pasal 188 UU 1/2015 agar sesuai dengan prinsip negara hukum dan menciptakan kepastian hukum yang adil sebagaimana norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

"Dalam perspektif paham konstitusi atau konstitusionalisme, aturan main yang ditetapkan desa atau sebutan lain atau lurah yang memberikan jaminan atas kepastian hukum yang adil, jaminan mana merupakan salah satu hak dasar harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya," ucap Hakim Konstitusi Arief Hidayat. (\*)

## Buka Rapat Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN 2024, Ini Harapan Sekda Sultra



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol. (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M. Hum.,Ph.D turut hadir memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi Rapat Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN khususnya terkait dekonsentrasi dan tugas pembantuan Tahun Anggaran 2024 lingkup Provinsi Sultra, Kamis (14/11/2024), di Kendari.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Sultra menyampaikan sejumlah arahan penting termasuk harapan besar pimpinan Sultra, agar kegiatan tersebut tetap merekomendasikan segala upaya demi kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sultra.

Sekda Sultra ini menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dia melanjutkan, dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang selanjutnya disebut dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

"Tugas pembantuannya adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah dari pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi," terangnya.

Jenderal ASN Provinsi Sultra ini menjelaskan, pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten kota untuk, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan, yang disertai kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkan kepada yang memberi penugasan.

Dia melanjutkan, pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum bagi masyarakat Sultra.

"Berdasarkan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah, Provinsi Sultra juga memperoleh alokasi anggaran APBN baik berupa dekonsentrasi yang berada pada 25 Satker dan 14 perangkat daerah, maupun tugas perbantuan yang berada pada 13 Satker dan 5 perangkat daerah," jelasnya.

Dia menerangkan, berkaitan hal tersebut maka rapat dimaksud akan difokuskan pada evaluasi serapan anggaran dan pengawasan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

"Saya berharap kita dapat saling berdiskusi dan memberikan masukan yang konstruktif, untuk pencapaian realisasi yang maksimal, mengingat kita telah memasuki akhir triwulan ke IV, artinya kurang lebih

1 (satu) bulan lagi tahun anggaran 2024 akan berakhir," ujarnya.

Selain itu, Sekda Sultra ini juga kembali menegaskan kepada setiap perangkat daerah yang mengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, agar dapat memaksimalkan serapan anggaran dan progres fisik dalam kurun waktu yang tinggal 1 (satu) bulan, sehingga tugas dan fungsi gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dapat memastikan semua progres serapan anggaran dan progres fisik, berjalan sesuai dengan ketentuan.

"Harapan saya, dengan kegiatan ini dapat mewujudkan konsistensi dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, agar dilakukan dengan asas efisien, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sultra," harapnya.

Sebelum membuka secara resmi rapat pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) tahun 2024 lingkup Pemprov Sultra yang digelar oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Sekda Sultra kembali berpesan agar rapat tersebut dapat bermanfaat bagi semua, terutama untuk kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sultra.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya para kepala perangkat daerah selaku kpa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup pemerintah provinsi sultra, para pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup pemerintah provinsi sultra, dan berbagai pihak terkait lainnya. (\*)

## Sekda Sultra Hadiri Syukuran HUT Ke-79 Korps Brimob Polri



Pewarta: Amran

KENDRI, BP- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H Asrun Lio.,M. Hum.,Ph.D, menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Korps Brimob Polri yang berlangsung di Gedung Serba Guna Nuraga, Satbrimob Polda Sultra (Kamis, 14 November 2024). Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, baik dari jajaran Polda Sultra maupun dari instansi lainnya, termasuk unsur TNI, Kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Dansat Brimob Polda Sultra Kombes Sugianto Marweki, S.I.K., M.Si., menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang telah mendukung tugas Brimob Polri di Sultra. "Terima kasih kepada semua pihak

dan seluruh masyarakat yang telah bekerja sama dan memberikan dukungan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik demi kedamaian Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Ibu Ketua Bhayangkari Daerah Sultra beserta pejabat utama Polda Sultra, Komandan TNI Angkatan Udara Haluoleo, Komandan korem 143/HO, Komandan TNI AL Kendari, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala BNN atau yang diwakili, serta sejumlah Kapolres dan jajaran Polda Sultra lainnya.

Dansat Brimob berharap acara syukuran ini menjadi momen untuk mempererat hubungan antar lembaga dan masyarakat

kat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Sultra. "Semoga kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan dalam melaksanakan tugas untuk mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara," tambah Kombes Pol Sugianto.

Dalam acara ini, Kombes Sugianto juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan dalam pelaksanaan tugas. "Kami memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan. Kami berharap dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutupnya.

Acara berlangsung dengan penuh khidmat, diakhiri dengan doa dan harapan agar Korps Brimob Polri

## Update Peringatan Dini Informasi MKG, berlaku 14 - 20 November 2024, sebagai berikut :

Informasi Cuaca

1. Tgl 14 November 2024 berpotensi hujan sedang hingga lebat yg dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Kendari, Konawe, Konawe Selatan, Kolaka Timur, Kolaka Utara dan Kolaka.

2. Tgl 15 November 2024 berpotensi hujan sedang hingga lebat yg dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Konawe Selatan, Kolaka Timur dan Kolaka.

3. Tgl 16 November 2024 berpotensi hujan sedang hingga lebat yg dapat disertai guntur dan

angin kencang di wilayah Kolaka Utara dan Muna Barat.

4. Tgl 17 November 2024 berpotensi hujan sedang hingga lebat yg dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Konawe Utara dan Kolaka Utara.

5. Tgl 18 November 2024 berpotensi hujan sedang hingga lebat yg dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Kolaka, Kolaka Utara dan Muna Barat.

6. Tgl 19 November 2024 berpotensi hujan sedang hingga lebat yg dapat

disertai guntur dan angin kencang di wilayah Kolaka, Kolaka Utara dan Kolaka Timur.

7. Tgl 20 November 2024 berpotensi hujan sedang hingga lebat yg dapat disertai guntur dan angin kencang di wilayah Konawe Selatan, Kolaka dan Kolaka Utara.

Info Gelombang Tinggi

Diperkirakan ketinggian gelombang di wilayah pelayaran perairan Sulawesi Tenggara tanggal 14 - 20 November 2024 berada pada kategori tenang hingga rendah (0.1 - 1.25 meter) (\*)

## Pj Bupati Buteng Kostantinus Bukide Resmikan Gedung Asrama Santri



### Laporan: Hengky

BUTENG, BP-Pj Bupati Buton Tengah, Kostantinus Bukide, meresmikan gedung asrama santri beserta fasilitas operasional Madrasah Ibtidaiyah Alkhairaat (MIAbH) cabang Buton Tengah yang berlokasi di Waburens, Kana-

pa-napa, Kecamatan Mawasangka, Selasa (22/10/2024).

Dalam sambutannya, Pj Bupati Kostantinus Bukide menyampaikan pentingnya kualitas pendidikan dan fasilitas pendukung bagi santri di Buton Tengah. Kehadiran gedung ini diharap-

kan dapat memberikan kenyamanan serta mendukung para santri dalam menempuh pendidikan yang lebih baik.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan sektor pendidikan, terutama pendidikan

agama, demi terciptanya generasi yang cerdas dan berakhlak mulia”,ujarnya.

Dengan fasilitas yang lebih memadai, MIAbH cabang Buton Tengah siap mencetak santri yang berprestasi dan berkontribusi positif bagi pembangunan dan bangsa.(\*)

## Pemkab Buton Launching Core Values dan Employer ASN berAKHLAK

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Bupati Buton meluncurkan Core Values dan Employer ASN BerAKHLAK. Peluncuran itu dilaksanakan pada saat Apel di Pekan terakhir, Senin, 30 September 2024 di Pelataran Tugu Nenas, halaman Kantor Bupati Buton, Takawa, Pasarwajo.

Pj. Bupati Buton, La Haruna, SP. MSi, mengharapkan kepada seluruh ASN untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab se-



bagai abdi Negara dan pelayan masyarakat.

Adanya core values ini juga diharapkan dapat menyatukan persepsi sehingga menjadi lebih mudah

dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN di Indonesia.

Usai Arahan pada Apel pagi Pj Bupati Buton memberikan se-

matan pin ASN berAKHLAK secara simbolis kepada beberapa ASN Lingkup Pemkab Buton.(\*)

## Pemkab Buton dan UHO Gelar FGD Penyusunan Kajian Resiko Bencana

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton diwakili Staf Ahli Bupati Buton Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Sahli), H. Abdul Rais, SP membuka Fokus Group Discussion (FGD) dalam rangka Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Buton Tahun 2024 bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari di Aula Hotel Buton Raya, Jumat 20 September 2024.

Seminar ini dihadiri Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Halu Oleo, Dr. La Ode Restele M.Si

(Ketua Tim Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab. Buton), Kepala BPBD Kab. Buton, Kepala BMKG Kota Baubau dan Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton dan juga Para Camat Sekabupaten Buton.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Bupati Buton Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar upaya penanggulangan bencana di daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

“Kabupaten Buton sebagai daerah yang memiliki banyak penduduk dengan berbagai jenis mata pencaharian serta pendapatan yang berbeda-beda dan juga memiliki tingkat hunian dan status sosial yang tidak sama, sehingga memiliki tingkat risiko multi bencana yang beragam sesuai dengan jenis bencana yang terjadi,” kata H. Abdul Rais.

Sebagai daerah yang memiliki tingkat multi risiko bencana yang beragam, kata Sahli maka perlu suatu dokumen kajian serta sebaran kejadian dan tingkat risiko bencana

yang berpotensi dan sering terjadi di Kabupaten Buton.

“Penyusunan dokumen kajian risiko bencana yang kita lakukan bersama dengan Universitas Halu Oleo merupakan langkah tetap, dengan perihal Himbauan dan Informasi Kegiatan Dukungan Teknis Bidang Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana Tahun 2024), poin 6 tentang kewajiban Bupati/ Walikota menginstruksikan dan memantau penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana di wilayahnya masing-masing yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah

## Darwanita Persatuan Sultra Kunker di Buton Selatan



### Laporan : Eron

BUSEL, BP-Kunjungan Kerja (Kunker) Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton Selatan dalam rangka Pembinaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton Selatan. Ny. Iffah Insyirah Mukti Parinringi, SE Ketua Dharma Wanita Per-

satuan Kabupaten Buton Selatan bersama seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan Buton Selatan menerima kunjungan kerja di Gedung Wisata di Buton Selatan dengan tarikan serta pengalungan bunga, pada Rabu 09/10/2024.

Ketua DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Waode Munanah Asrun Lio dengan rombongan langsung menuju Gedung Wisata. Dalam kun-

jungan tersebut Ketua Pengurus DWP Provinsi Sulawesi Tenggara Ny. Waode Munanah Asrun Lio menyampaikan, tujuan dari Kunker ini untuk Menyamakan Program Persepsi dari Pusat ke Provinsi hingga ke Kabupaten/kota, serta dalam rangka Pembinaan Program Kerja Dharma Wanita Persatuan di Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Buton Selatan.(\*)

## Tim Penilaian Lomba 10 Program PKK Kunjungi Desa Kaongkekea

### Pewartar: Rahim

BUTON, BP-Tim Penilaian Lomba 10 Program PKK kunjungi Desa Kaongkekea, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Ketua TP. PKK Kabupaten Buton, Ny. Wa Ode Naharia Haruna, S.PKP., M.M. Bersama Anggota dan Kader PKK Kabupaten Buton menyambut rombongan Tim Penilai di Pelataran Aula Kantor Desa Kaoengkekea, Kecamatan Pasarwajo, Jumat, 4 Oktober 2024.

Kedatangan tim penilai juga disambut Pj. Bupati Buton yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Buton, Nanang Lakaungge, SKM, MSi, Para Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton, Camat Pasarwajo, Drs. Amruddin, Pemerintah Desa dan tokoh Masyarakat setempat.

Dalam sambutannya Pj. Bupati Buton La Haruna SP., M.Si yang dibacakan Asisten II Sekda Buton, mengucapkan selamat datang ke-

pada Tim Lomba 10 Program PKK Sulawesi Tenggara di Kabupaten Buton yakni di Desa Kaoengkekea.

Pj. Bupati Buton mewakili Pemerintah daerah menghimbau agar PKK dapat lebih berperan aktif dalam melaksanakan 10 program pokok PKK sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah guna mengatasi berbagai permasalahan sosial ekonomi masyarakat baik melalui kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga, kegiatan posyandu maupun lansia, kegiatan pelatihan keterampilan, penyuluhan tentang Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, penyuluhan makanan bergizi dan berimbang serta pemanfaatan gerakan dalam mendukung ketahanan pangan keluarga.

“Saya berharap pula melalui lomba ini, kita dapat menemukan ide-ide baru yang dapat diterapkan di lapangan demi kemajuan Bersama.” katanya. Pada kesempatan ini pula Sekretaris TP PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Devi Yunariasari menyampaikan kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang menjadi program kerja tim PKK provinsi Sulawesi Tenggara. “Lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menumbuhkan jiwa semangat pengabdian serta kompetensi kemampuan para kader PKK dan juga untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pelaksanaan 10 program PKK secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, maupun Kabupaten/kota dan juga sebagai sarana apresiasi terhadap para kader yang berada di pelosok-pelosok pedesaan yang berhasil mengimplementasikan 10 program PKK dengan efektif,” katanya.(\*)

## Wamenkes Ingin tak Ada yang Tertinggal dalam Transformasi Digital Kesehatan



JAKARTA-Integrasi dan digitalisasi data kesehatan menjadi perhatian Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksiono Harbuwono saat menyampaikan sambutan pada acara UNDP Indonesia Policy Volume yang mengusung tema Bright Prospect, Lingering Shadows: Toward an Inclusive Digital Transformation in Indonesia di Gedung Tri Brata, Jakarta, Senin (11/11).

“Dengan memfasilitasi konektivitas, integrasi data, dan layanan kesehatan yang dapat diakses secara nasional, kita berjuang merealisasikan visi Indonesia sehat untuk mendukung pilar ke enam transformasi kesehatan yaitu transformasi teknologi kesehatan.”

Lebih lanjut, Wamenkes Prof. Dante menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengembangan transformasi digital. Salah satu langkah yang telah diambil oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1568/2024 ten-

tang Sistem Monitoring Inventaris Logistik Kesehatan secara Elektronik.

Wamenkes menambahkan, kegiatan yang diselenggarakan oleh UNDP ini dapat memberikan masukan berharga bagi Kemenkes. Prof. Dante menekankan pentingnya transformasi digital yang inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. “Bagaimanapun, berbagai kemajuan harus inklusif (dirasakan banyak orang), dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal,” ujar Wamenkes Prof. Dante.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura menggarisbawahi tiga hal yang menghambat proses publikasi kebijakan, yaitu kesenjangan digital, standar etika, dan polarisasi. Menurutnya, transformasi digital dapat menjadi sarana efektif untuk menghubungkan berbagai kebijakan dengan masyarakat.

“Kita perlu mengatasi kesenjangan digital, memperkuat standar etika, dan melawan polarisasi

dengan memanfaatkan transformasi digital bagi seluruh masyarakat Indonesia, ujarnya.

Norimasa Shimomura juga menyampaikan empat hal yang menjadi perhatian UNDP terkait isu kesenjangan digital. Pertama, kesenjangan akses digital, yakni pengguna internet di Jakarta mencapai 84,7%, sementara di Papua hanya 26,5% untuk pengguna berusia di atas lima tahun.

Kedua, kesenjangan gender dan usia. Pada 2022, kesenjangan akses internet antara laki-laki dan perempuan mulai berkurang, yaitu sebesar 63,8% untuk laki-laki dan 63,5% untuk perempuan. Namun, perempuan lanjut usia yang tinggal di daerah perdesaan dan perempuan dengan pendidikan formal yang lebih rendah masih menghadapi hambatan signifikan terhadap akses digital.

Ketiga, risiko disinformasi atau hoaks. Diperkirakan sekitar 82 juta penduduk Indonesia rentan terhadap propaganda digital, terutama menjelang Pemilu

2024. Gen Z, yang jumlahnya mencapai 27,94% dari total penduduk Indonesia, menjadi kelompok yang paling rentan.

Keempat, polarisasi dan efek ruang gema (echo chambers). Platform daring dapat memperkuat ruang gema politik, mengisolasi pengguna dalam kelompok dengan pandangan atau pemikiran yang sama, sehingga berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan membatasi terciptanya ruang dialog.

Menyikapi hal tersebut, Wamenkes Prof. Dante menyambut baik berbagai masukan terkait kebijakan kesehatan dari lembaga seperti UNDP. Menurutnya, masukan-masukan ini dapat memberikan gambaran mengenai kesenjangan digital di masyarakat yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan kebijakan.

“Bersama-sama kita dapat menjembatani kesenjangan digital, menjunjung tinggi standar etika, dan mengatasi polarisasi sosial, memastikan manfaat transformasi digital dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Wamenkes Prof. Dante. (\*)

## Perkuat Layanan Jantung Nasional: 13 Dokter Spesialis Jantung Indonesia Berguru ke Tiongkok



### Laporan: Amran

JAKARTA-Sebanyak 13 dokter spesialis jantung Indonesia diberangkatkan ke Tiongkok untuk mengikuti program fellowship intervensi jantung. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) pada periode 2024-2027.

Fellowship merupakan program pelatihan lanjutan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang bertujuan memperdalam pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu. Dengan kurikulum dan kompetensi yang terarah pada subspecialis tertentu, program ini membantu peserta memberikan layanan medis yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia kedokteran.

“Kemenkes akan terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM bagi memenuhi kebutuhan prioritas pelayanan KJSU-KIA melalui Fellowship dokter spesialis baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama di negara-negara yang memiliki keunggulan dalam pelayanan kesehatan sebagai contoh di Tiongkok dan Jepang,” ujar Yuli Farianti, Plt. Dirjen Tenaga Kesehatan.

Dari 13 peserta fellowship, enam dokter akan menjalani pelatihan di Wuhan Asia Heart Hospital, sementara tujuh lainnya akan menempuh pendidikan di Fudan University Zhongshan Hospital. Kedua institusi ini dikenal luas dalam bidang intervensi jantung dan telah menyambut para fellow dengan baik.

Durasi program fellowship ini adalah 12 bulan, di mana para dokter akan mendapatkan pelatihan intensif dan pengalaman langsung di lapangan. Program ini sepenuhnya dibi-

ayai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), mencakup biaya registrasi, tuition fee, visa, serta seminar yang akan mendukung pengembangan kompetensi mereka selama menjalani studi.

Ketigabelas dokter spesialis yang terpilih untuk program fellowship di Tiongkok telah melewati proses seleksi ketat, termasuk pemberkasan dokumen dan wawancara. Mereka diharapkan dapat menerapkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama program ini untuk meningkatkan layanan intervensi jantung di rumah sakit asal mereka.

Dengan adanya program fellowship ini, diharapkan pelayanan intervensi jantung di Indonesia akan meningkat secara signifikan, memberikan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Inisiatif ini merupakan langkah positif dalam membangun sistem kesehatan yang lebih kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (kemkes)

**Baubau Post**  
Kritik, Lugas, Independen  
Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik. Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post.  
Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA  
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi  
Redpel : Hengky TA  
Korlip : Hengky T.A  
Redaktur : Alyakin, Kasrun  
Reporter : Rahim, Mashuri, Jaya, Azis, Lisna

Layouter : Rlirin  
Pracetak : Aditya  
Cetak : Jamal

Penerbit : PT. Faren Grafika  
Komisaris : Erna Agule  
Direktur Utama : Andina Latief, SKM  
Manager Keuangan : Nabila D.A  
Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan  
Kepala Sirkulasi : Jamal  
Administrasi : Salvana  
Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman  
Kepala Biro Buton Utara : Fauzan  
Kepala Biro Buton : Rahman  
Kepala Biro Busel : Salvana  
Kepala Biro Buteng : Andini  
Kepala Biro Bombana :  
Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr  
Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,  
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya  
Agen Pasarwajo :  
Agen Butur : Samrihan  
Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,  
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,  
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau  
Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com  
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

## Kapolri Sebut 181 Teroris Ditangkap dalam Setahun Terakhir



Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan ada 181 tersangka teroris yang berhasil ditangkap Densus-Brimob dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

### Pewarta: Alwan

JAKARTA- Kapolda Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan ada 181 tersangka teroris yang berhasil ditangkap polisi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Ia mengatakan keberhasilan itu berkat kolaborasi antara Korps Brimob dengan Densus 88 Anti-teror Polri.

"Terkait dengan penegakan hukum teroris, terima kasih bahwa rekan-rekan Brimob selama ini telah berkolaborasi dengan Densus dan selama 2023-2024

kita telah mengamankan kurang lebih 181 tersangka," ujar Listyo dalam acara 'Syukuran HUT Ke-79 Korps Brimob Polri' di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kamis (14/11).

Sigit mengapresiasi kolaborasi jajaran Korps Brimob dengan Densus 88 itu. Menurutnya, peran Menurunya, Korps Brimob tak bisa dilepaskan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Tentunya peran Brimob, untuk selalu hadir menjaga kam-

tibmas, tentunya ini menjadi hal yang tak bisa dielakkan oleh rekan-rekan semua," ucapnya.

Dia meminta agar kinerja baik tersebut terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Polri untuk melakukan deteksi dini terkait ancaman teror di Indonesia.

Karena itu, dia mendorong agar fungsi pencegahan lewat kegiatan preventive strike dapat terus berjalan. Na-

mun, Sigit mengingatkan agar penindakan tetap dilakukan dengan adanya bukti-bukti yang cukup.

"Bapak Presiden perintahkan bahwa tidak boleh ada ledakan sekecil apa pun, atau biasa yang kita kenal zero crime," kata Sigit.

"Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan kegiatan yang namanya preventive strike, mengamankan peristiwa dengan didahului adanya bukti-bukti yang cukup," imbuhnya. (\*)

## 10 Pegawai Komdigi Tersangka Kasus Judi Online Diberhentikan

### Pewarta: Alwan

JAKARTA-Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah memberikan sanksi tegas kepada pegawai Komdigi tersangka kasus mafia akses judi online. Dia mengatakan 10 orang pegawai itu telah diberhentikan.

"10 sudah diberhentikan," kata Meutya di Gedung Komdigi, Jakarta Pusat, mengutip detikcom, Kamis (14/11).

Meutya mengatakan kasus tersebut saat ini masih terus ditangani Polda Metro Jaya. Dia mengatakan penanganan kasus hukum merupakan wewenang polisi.



Menkomdigi ungkap pegawai terlibat judi online sudah diberhentikan.

"(10 pegawai Komdigi) sudah diberhentikan. Kalau kasus hukum bukan di kami, dari kami itu," katanya.

Meutya mengatakan dirinya sudah melakukan evaluasi internal di Komdigi. Sejumlah SOP di Komdigi saat sedang dikaji ulang.

"Semua SOP-nya lagi kita audit lagi. Yang lama saya nggak komentar dan enggak paham juga, tapi kita lagi audit lagi," jelas Meutya.

Polda Metro Jaya masih terus mengembangkan penyidikan kasus mafia akses judi online yang melibatkan pegawai

Kementerian Komunikasi dan Digital. Total saat ini sudah 18 orang tersangka ditangkap di kasus tersebut.

"Sampai saat ini terdapat 18 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade

## KPK Sita Rumah Mewah di Medan Terkait Kasus Pengadaan Tanah Rorotan

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah di Kota Medan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) tahun 2019-2020, Kamis (14/11).

"Penyidik KPK telah melakukan penyitaan sebuah rumah mewah yang berlokasi di Kota Medan atas nama SS dengan luas 90 meter persegi," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiar-to melalui keterangan tertulis, Kamis (14/11).

Berdasarkan informasi yang diperoleh, rumah yang disita tersebut milik Wakil Direktur Utama Totalindo (TOPS) Salomo Sihombing yang berstatus saksi dalam kasus ini.

KPK, lanjut Tessa, menyampaikan terima kasih kepada

masyarakat yang membantu memberikan informasi demi memperlancar penanganan kasus tersebut.

Sebanyak lima orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Mereka ialah mantan Direktur Utama PPSJ

Yoory Cornelis Pinontoan (YCP); Senior Manager Divisi Usaha atau Direktur PPSJ Indra S. Arhar-rys (ISA); Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada (TEP) Donald Sihombing (DNS); Komisaris PT TEP Saut Irian-to Rajagukguk (SIR); dan Direktur Keuangan PT TEP Eko Wardoyo (EKW).

Yoory diduga menerima valas dalam denominasi SGD sejumlah Rp3 miliar dari PT TEP. Selain itu, ia disebut juga mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam penjualan aset milik pribadi yang segera dibeli oleh pegawai PT TEP.

Kasus ini diduga merugikan keuangan negara sejumlah Rp223.852.761.192 (Rp223 miliar) yang diakibatkan penyimpangan dalam proses investasi dan pengadaan tanah oleh PPSJ pada tahun 2019-2021.

Nilai kerugian negara/daerah tersebut berasal dari nilai pembayaran bersih yang diterima PT TEP dari PPSJ sebesar Rp371 miliar (Rp371.593.267.462,00) dikurangi harga transaksi riil PT TEP dengan pemilik tanah awal PT Nusa Kirana Real Estate (PT NKRE) setelah memperhitungkan biaya terkait lainnya seperti pajak, BPHTB dan biaya notaris sebesar total Rp147.740.506.270.

Yoory dkk disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Aman)

## Pemain Judi Online di Indonesia Capai 8,8 Juta, Mayoritas Anak Muda

### Laporan: Alwan

JAKARTA- Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan ada 8,8 juta warga yang tercatat bermain judi online di 2024 ini.

Mayoritas dari jutaan pemain judi online itu adalah masyarakat bawah dan anak muda.

"Kalau dari data judi online dari intelijen ekonomi itu di tahun 2024 sebanyak 8,8 juta pemain, dimana 80 persen adalah masyarakat bawah dan menasar ke anak muda," kata di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta Timur, Kamis

(14/11).

Judi online menjadi salah satu fokus pemerintahan Prabowo untuk ditangani. Terkait hal tersebut, pemerintah sebelumnya membentuk desk penanganan judi online yang dipimpin Kapolri.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya mencatat perputaran uang terkait judi online selama semester II tahun 2024 mencapai Rp283 triliun, naik dari semester I.

"Per semester I saja sudah menyentuh Rp174 triliun. Saat ini sudah semester II, PPATK melihat sudah mencapai Rp283 triliun," kata Kepala

PPATK Ivan Yustiavandana beberapa waktu lalu.

Ivan mengatakan jumlah transaksi di semester I tahun ini melampaui satu tahun penuh di 2022.

Kenaikan tersebut diduga disebabkan oleh perubahan strategi yang dilakukan para bandar. Kini, mereka melakukan transaksi dengan angka yang lebih kecil tetapi masif.

"Jadi, kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya jutaan-juta. Nah, sekarang bisa Rp10.000 kita sudah melihat ada seorang bisa judol. Itu yang membuat transaksi semakin masif," kata Ivan. (\*)

Ary Syam Indradi.

Dari 18 orang tersangka itu, Ade Ary merincikan 10 orang adalah pegawai Komdigi dan

8 lainnya adalah warga yang bukan pegawai Komdigi. Para tersangka ini diduga membuka akses blokir situs judi

online. Situs yang blokirnya dibuka kemudian menyetorkan uang ke para tersangka. (\*)

1



CALON BUPATI  
SYARASWATI

CALON WAKIL BUPATI  
Drs. H. RASYID  
MANGURA, M.H.

PASANGAN CALON PERSEORANGAN

VISI

MEWUJUDKAN KABUPATEN BUTON YANG MANDIRI, MAJU,  
DAN BERDAYA SAING MELALUI OPTIMALISASI  
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN  
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI

1. MENINGKATKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING.
2. MENDORONG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.
3. MEMAJUKAN SEKTOR PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN DENGAN TEKNOLOGI MODERN.
4. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.
5. MENGOPTIMALKAN PARAWISATA BERBASIS SUMBER DAYA ALAM DAN BUDAYA LOKAL.
6. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF

2



CALON BUPATI  
Drs. LA BAKRY, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI  
ARIS MARWAN SAPUTRA,  
S.H.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN  
MENUJU INDONESIA EMAS 2045

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) SAINS, TEKNOLOGI DAN TATA RUANG KAWASAN.
2. TRANSFORMASI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM).
3. KESETARAAN GENDER, PEMULA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z) DAN PENYANDANG DISABILITAS.
4. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, UMKM DAN INDUSTRI KREATIF
5. REFORMASI BIROKRASI, KESADARAN HUKUM DAN TRANSPORTASI KEBUAKAN PEMERINTAH DAERAH.
6. PERKUAT PENYELARASAN HUBUNGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN PELESTARIAN BUDAYA.

3



CALON BUPATI  
H. LA ODE NAANE

CALON WAKIL BUPATI  
H. AKALIM, S.Pd.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI RUMAH BERSAMA YANG CERDAS, SEJAHTERA, BERDAYA SAING, MENGHARGAI PERBEDAAN DAN MEMILIKI JIWA GITONG ROYONG

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNANCE, DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING BAGI MASYARAKAT BUTON SMART.
2. MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU MENUJU GENERASI BUTON EMAS.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA KABUPATEN BUTON YANG CERDAS (BUTON SMART CITY).
5. MENGUATKAN BUDAYA MASYARAKAT YANG SALING MENGHARGAI DAN JIWA GOTONG ROYONG.

4



CALON BUPATI  
Drs. BASIRAN, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI  
LA ODE RAFIUN, S.Pd.,  
M.Si.

PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BUTON MAJU, TERCIPTANYA MASYARAKAT BUTON YANG ADIL DAN MAKMUR DI TAMBAI DENGAN MENINGKATNYA DERAJAT PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA KONDISI EKONOMI MASYARAKAT LEBIH BAIK. BUTON BERDAYA SAING, MASYARAKAT BUTON YANG MERELIKI KELINGGULAN KOMPETITIF UNTUK MENGHADAPI PERSAINGAN DI MASA YANG AKAN DATANG MENUJU INDONESIA EMAS 2045-2029

MISI

1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA MELALUI PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DAN MUDA SERTA TERJANGKAU.
3. MEMBANGUN EKONOMI YANG KREATIF DAN INOVATIF DENGAN PERTIMBANGAN DAYA SERAP TENAGA KERJA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.
4. MENINGKATKAN KETAHANAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM ANCAMAN DAN GANGGUAN BERLANDASKAN NILAI NILAI FALSAFAH DAN BUDAYA KEBUTONAN DENGAN MENUNJUNG TINGGI NORMATIF KEAGAMAAN.
5. MEMBANGUN SARANA DAN PRASARANA DASAR YANG PRIORITAS UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA DAERAH MAJU BAIK KUANTITAS MAUPUN KUALITAS.
6. MENIMPLEMENTASIKAN ADAT ISTADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH DALAM MENAKIKAN KARASITAS DAERAH.

5



CALON BUPATI  
Dr. BERE ALI, M.Si.

CALON WAKIL BUPATI  
LAODE MUHAMAD  
SUMARLIN BUCHARI, S.E.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

BERLIAN MEWUJUDKAN BUTON YANG LEBIH BAIK

MISI

1. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI MODAL UTAMA PEMBANGUNAN.
2. PENUMBUHAN INVESTASI SEBAGAI SARANA PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA.
3. PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR SECARA MERATA.
5. PELAYANAN PUBLIK YANG SEMAKIN EFEKTIF DAN EFISIEN.

6



CALON BUPATI  
ALVIN AKAWIJAYA  
PUTRA, S.H.

CALON WAKIL BUPATI  
SYARIFUDIN SAAFA, S.T.

GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL



VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING MELALUI PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (BUTON BERSINAR MAS)

MISI

1. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE), SERTA MENDORONG TERCIPTANYA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG RELIGIUS, KONDISIF DAN BERBUDAYA.
2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS.
3. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS POTENSI LOKAL, MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN KESEMPATAN BERUSAHA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN.